

PENGARUH PEMECAHAN SAHAM DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM

M. Anas

POLA PEMBINAAN KREDIT USAHA MIKRO KAIN TENUN IKAT DITINJAU DARI SEGI ASPEK KEUANGAN (STUDI PADA UMKM SENTRA KAIN TENUN IKAT BANDARLOR KOTA KEDIRI)

Rr. Forijati

KONTRIBUSI PERSEPSI KINESTETIK DAN KELINCAHAN TERHADAP HASIL KETEPATAN TEMBAKAN BOLA BASKET

Sugito

ANALISA CAMEL SEBAGAI ALAT UNTUK MENILAI TINGKAT KESEHATAN BANK (STUDI KASUS PADA PT BANK JATIM CABANG NGANJUK)

Subagyo

ANALISIS IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) (STUDI KASUS DI KABUPATEN KEDIRI)

Suryo Widodo

A CLOSER LOOK AT THEORIES OF ANALYZING ERRORS IN ENGLISH

Ulfie Nur Aisyah

PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN LATAR KOOPERATIF DAN KEMAMPUAN BERPIKIR FORMAL TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA

Yuni Katminingsih



EFEKTOR

Kebijakan Editorial dan Persyaratan Naskah

Penulis harus menyatakan bahwa artikel yang dikirimkan ke EFEKTOR belum pernah dipublikasikan dalam jurnal lain, dan diutamakan artikel hasil penelitian/survey. Pemuatan artikel melalui proses *blind review* oleh editor, dengan mempertimbangkan antara lain: terpenuhinya persyaratan baku publikasi jurnal, metodologi penelitian, serta signifikansi kontribusi hasil penelitian terhadap pengembangan ilmu dan profesi kependidikan.

Penulis artikel berkewajiban memberikan keterangan, data, maupun informasi lain mengenai penelitian tersebut, apabila ada pihak lain yang memerlukannya untuk penelitian lanjutan, maupun untuk pengembangan praktek kependidikan,

Persyaratan Naskah:

1. Naskah ditulis dalam bahasa Indonesia dan atau bahasa asing, dengan mengikuti kaidah-kaidah penulisan bahasa Indonesia/asing yang benar.
2. Naskah diketik dengan jarak baris double (2 spasi), pada kertas ukuran quarto/letter/A4, jenis karakter Time New Roman 12, dengan panjang tidak lebih 7.000 kata, atau antara 15 – 20 halaman.
3. Sistematika penulisan/pembahasan artikel setidaknya berisi bagian-bagian: Abstrak/sinopsis, Pendahuluan, Kerangka Teori, Metode Penelitian, Analisis Data, Saran/rekomendasi, Implikasi hasil penelitian, dan Daftar referensi.
4. Setiap kutipan harus menyertakan sumbernya, dengan meletakkan pada akhir kutipan dalam tanda kurung, memuat nama, tahun penerbitan dan halaman.
5. Abstrak/sinopsis disajikan pada awal tulisan dengan panjang antara 150-200 kata, dengan bahasa Indonesia, bahasa asing atau keduanya, diikuti dengan kata kunci (*keyword*) untuk memudahkan penyusunan indeks artikel.
6. Daftar pustaka/referansi hanya yang digunakan sebagai acuan langsung, dibuat secara alfabetis, dengan urutan: nama (dimulai dengan nama keluarga), tahun, judul buku/karangan (dicetak tebal/bold), nama penerbit, dan kota tempat penerbitan.
7. Halaman judul setidaknya harus memuat nama lengkap peneliti (termasuk untuk peneliti tim), dan unit kerja atau lembaganya.
8. Naskah diserahkan dalam bentuk cetakan serta CD.
9. Naskah yang karena sesuatu hal dipertimbangkan tidak dapat dimuat, dapat diminta kembali.

Redaktur

Ketua Pengarah : Rektor IKIP PGRI Kediri, Ketua LPPM IKIP PGRI Kediri
Redaktur/Editor: Suryanto (FPIPS), Andri Pitoyo (FPBS), Budi Utami (FPMIPA),
Slamet Junaedi (FPOK), Sri Panca Setyawati (FIP)
Alamat Redaksi : Gedung LPPM/FPIPS R-D1 IKIP PGRI Kediri
Kampus Mojojoto Jl. KHA Dahlan No.76 Telp. (0354) 771576, 771503
ISSN : 0854-1922
Distributor : LPPM IKIP PGRI Kediri
Jurnal **EFEKTOR** terbit enam bulanan pada bulan April dan Oktober.

EFEKTOR

Diterbitkan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (LPPM) IKIP PGRI Kediri dimaksudkan sebagai media informasi dan pembahasan masalah-masalah ilmu pendidikan dan ilmu sosial. Berisi ringkasan hasil penelitian, tulisan ilmiah, dan gagasan-gagasan orisinal dan kritis. Redaksi mengundang para ahli, para praktisi, pengamat, dan masyarakat umum untuk berdiskusi dan berkomunikasi melalui media ini.

DAFTAR ISI

EFEKTOR No.9, Oktober 2006

Kebijakan Editorial dan Persyaratan Naskah	i
Daftar Isi	ii
PENGARUH PEMECAHAN SAHAM DAN KINERJA KEUANGAN TERHADAP PERUBAHAN HARGA SAHAM M. Anas	1
POLA PEMBINAAN KREDIT USAHA MIKRO KAIN TENUN IKAT DITINJAU DARI SEGI ASPEK KEUANGAN (STUDI PADA UMKM SENTRA KAIN TENUN IKAT BANDARLOR KOTA KEDIRI) Rr. Forijati	11
KONTRIBUSI PERSEPSI KINESTETIK DAN KELINCAHAN TERHADAP HASIL KETEPATAN TEMBAKAN BOLA BASKET Sugito	21
ANALISA CAMEL SEBAGAI ALAT UNTUK MENILAI TINGKAT KESEHATAN BANK (STUDI KASUS PADA PT BANK JATIM CABANG NGANJUK) Subagyo	31
ANALISIS IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) (STUDI KASUS DI KABUPATEN KEDIRI) Suryo Widodo	41
A CLOSER LOOK AT THEORIES OF ANALYZING ERRORS IN ENGLISH Uffe Nur Aisyah	51
PENGARUH MODEL PEMBELAJARAN BERBASIS MASALAH DENGAN LATAR KOOPERATIF DAN KEMAMPUAN BERPIKIR FORMAL TERHADAP HASIL BELAJAR MATEMATIKA Yuni Katminingsih	57

ANALISIS IMPLEMENTASI BANTUAN LANGSUNG TUNAI (BLT) (STUDI KASUS DI KABUPATEN KEDIRI)

Oleh: Suryo Widodo

Dosen Matematika FPMIPA IKIP PGRI Kediri

ABSTRAK

Kebijakan pemerintah untuk menaikkan BBM 80% dari harga semula dan diikuti memberi bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga miskin (gakin), menjadi kontroversi di tahun 2005. Penelitian ini mengungkap implementasi BLT tersebut di lapangan. Hasil survey di lapangan menunjukkan bahwa:

Data di BPS (2003) menyebutkan terdapat 257.243 **gakin** dari 353.875 jumlah keluarga berarti terdapat 72% keluarga miskin di Kabupaten Kediri. Dari 257.243 **gakin** yang mendapat BLT tahap pertama sebanyak 97.389 **gakin**, berarti masih terdapat 62% **gakin** yang belum mendapat BLT. Hampir semua yakni 99,2% responden senang menerima bantuan berupa uang tunai. Terdapat 11,2 % masyarakat yang merasa tidak layak mendapat bantuan dari pemerintah namun menerima BLT (versi **gakin**). Walaupun besarnya tidak diketahui tingkat kebocoran termasuk tinggi, karena sebagian besar 97% penerima BLT memberikan ucapan terimakasih kepada petugas.

Kata Kunci: bantuan langsung tunai (BLT), Keluarga miskin (Gakin)

PENDAHULUAN

Latar belakang

Pemerintah SBY menaikkan harga BBM 80% dari harga semula pada tanggal 1 Oktober 2005. Hal ini dalam upaya mengurangi defisit anggaran. Sebab tahun ini subsidi BBM mencapai Rp 130 triliun. Oleh karena itu untuk menjaga dampak kenaikan tersebut terhadap beberapa komoditi lain maka pemerintah mengantisipasi dengan memberikan dana kompensasi terhadap keluarga miskin. Yakni keluarga yang memiliki pendapatan kurang dari Rp 170 ribu per bulan mendapatkan bantuan Rp 100 ribu per bulan per keluarga yang diberikan bersamaan kenaikan harga BBM tersebut.

Visi utama memberikan dan kompensasi tidak lain adalah untuk menghidupkan ekonomi rakyat. Mubyarto (2001) menyebutkan istilah ekonomi rakyat adalah istilah ekonomi sosial (*social economics*) dan istilah ekonomi moral (*moral economy*), yang sejak zaman penjajahan dimengerti mencakup kehidupan rakyat miskin yang terjajah. Bung Karno menyebutnya sebagai kaum marhaen. Ekonomi Rakyat adalah kegiatan atau mereka yang berkecimpung dalam kegiatan produksi untuk memperoleh pendapatan bagi kehidupannya. Mereka itu adalah petani kecil, nelayan, peternak, pekebun, pengrajin, pedagang kecil dll, yang modal usahanya merupakan modal keluarga (yang kecil), dan pada umumnya tidak menggunakan tenaga kerja dari luar keluarga. Tekanan dalam hal ini adalah pada kegiatan produksi, bukan konsumsi, sehingga buruh pabrik tidak masuk dalam profesi atau kegiatan ekonomi rakyat, karena buruh adalah bagian dari unit produksi yang lebih luas yaitu pabrik atau perusahaan. Demikian meskipun sebagian yang dikenal sebagai UKM (Usaha Kecil-Menengah) dapat dimasukkan ekonomi rakyat, namun sebagian besar kegiatan ekonomi rakyat tidak dapat disebut sebagai "usaha" atau "perusahaan" (*firm*) seperti yang dikenal dalam ilmu ekonomi perusahaan. Sehingga fokus pemberian dana

kompensasi ini pada kelompok masyarakat miskin atau keluarga miskin yang sering disebut **gakin**.

Namun bila dana kompensasi tersebut tidak sampai kesasaran dengan utuh, tepat waktu, disunat, atau dibagikan tidak sesuai jadwal maka tujuan pemerintah untuk meringankan beban ekonomi keluarga tidak mampu tidak akan tercapai. Hasil polling yang dilakukan Jawa Pos terhadap 1500 responden di Jakarta, Surabaya, dan Jogjakarta menunjukkan bahwa 55,5% sistem penyaluran bantuan langsung tunai ini tidak mampu mengatasi kebocoran pelaksanaan program. Untuk mengatasi ini 23,7 % responden mengatakan perlu pengawasan dari berbagai elemen masyarakat secara terkontrol dan terpadu untuk tahap selanjutnya.

Sejalan dengan hal tersebut tim penelitian ingin melihat secara langsung pelaksanaan penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada Gakin tersebut.

Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dan maksud diadakan penelitian penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) kepada keluarga miskin adalah:

1. untuk mengetahui apakah pendaftaran atau identifikasi keluarga miskin sesuai dengan kriteria yang ditetapkan (tepat sasaran).
2. untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembagian BLT secara langsung dilapangan dapat berjalan dengan baik.
3. untuk mengetahui adanya kebocoran pada pelaksanaan pembagian BLT secara langsung dilapangan.

Ruang Lingkup Penelitian

Lingkup bahasan dalam penelitian ini meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Penerima dana bantuan di Kabupaten Kediri
2. Pelaksana pembagian dana BLT di Kabupaten Kediri
3. Unsur lain yang terkait dengan BLT di Kabupaten Kediri.

KAJIAN TEORI

Istilah Gakin dan Kriteria

Kriteria 'miskin' masih terus diperdebatkan, JAKARTA (Bisnis): Hati-hati membantu orang miskin jika tidak mengerti kriteria kemiskinan dengan jelas, bisa-bisa bantuan yang diberikan menguap begitu saja. Itulah pesan Siti Oemijati Djajanegara, staf ahli Lembaga Demografi FE-UI, yang banyak mengamati masalah kemiskinan.

Beberapa rumah sakit di Jakarta, katanya, mulai tidak percaya dengan pengakuan miskin pasiennya walau mereka datang dengan surat pengantar dari ketua RT atau lurah tempat mereka tinggal. Melihat siapa yang mengunjungi dan makanan yang dibawa pembesuk, saya ragu apakah pasien tersebut memang miskin, ujar Oemijati mengutip seorang perawat.

Menurut Oemijati, orang tersebut secara fisik memang memenuhi kriteria miskin. Makan tidak lebih dari 2.100 kalori per hari dan pendapatan kurang dari Rp 27.905 per hari. Ukuran tersebut kasat mata, tetapi ada yang tidak kasat mata. Menurutny, ada tiga hal yang turut menentukan apakah seseorang dapat dikatakan benar-benar miskin, yaitu kepastian atau ketidakpastian dalam memenuhi kebutuhan dasar, sikap mental atau cara berfikir, dan jaringan sosial. Dalam kasus di rumah sakit tersebut, pasien yang bersangkutan mempunyai jaringan sosial yang luas. Hal itu menunjukkan besarnya

peluang yang dimiliki orang tersebut sehingga tidak memerlukan bantuan yang relatif besar.

Tolok ukur kemiskinan memang menjadi perdebatan yang tidak kalah hebat dengan masalah peningkatan ekspor, misalnya, karena hal itu menjadi tolok ukur kesejahteraan satu negara. Menurut team penelitian, kriteria miskin yang ditetapkan pemerintah seperti jumlah kalori yang dikonsumsi untuk Kabupaten Kediri, tingkat pendapatan Rp 600.000,00 per kapita per bulan.

Bentuk Bantuan

Keluarga miskin dengan jaringan sosial yang kecil dan sikap mental atau cara berfikir yang masih sederhana membutuhkan bantuan yang lebih intens seperti pelatihan. Mereka tidak bisa diberi modal untuk meningkatkan taraf hidupnya. Selain pendekatan yang bersifat menyeluruh, penghapusan masalah kemiskinan memerlukan waktu yang relatif panjang, paling tidak dalam kurun waktu satu pembangunan jangka panjang (PJP). Dia menyayangkan penghentian program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dinilai cukup berhasil dalam mengatasi masalah kemiskinan karena sebenarnya tidak cukup dalam waktu satu-dua tahun saja. Menjadi bumper Dimensi lain dari pengurangan jumlah orang miskin adalah semakin kuatnya per-ekonomian nasional. Hal itu diakui Didin S. Damanhuri, kepala Penelitian Ekonomi Politik CIDES dan Ahli Peneliti Utama PEP-LIPI Thee Kian Wee. Pada tahun 1993, jumlah penduduk yang ada di bawah garis kemiskinan mencapai 25,9 juta jiwa atau 13,7% dari total penduduk. Sedangkan pada 1996, jumlah itu menurun menjadi 22,5 juta jiwa atau 11,3% total penduduk.

Sedangkan pada tahun ini pemerintah dengan segala resiko mencoba memberikan bantuan berupa uang dengan sebutan **bantuan langsung tunai (BLT)**

METODE PENELITIAN

Variabel Penelitian

Variabel penelitian ini ditinjau dari dua aspek yakni, aspek petugas dan aspek penerima bantuan. Pengambilan dua aspek ini sebagai *cross check* atau bentuk triangulasi data penelitian. Variabel penelitian untuk petugas BLT meliputi, usulan jumlah gakin, sosialisasi program, kendala yang dihadapi petugas, pencairan BLT, kebocoran BLT. Variabel penelitian untuk penerima BLT meliputi, bentuk bantuan, kelayakan masuk gakin dengan kriteria masyarakat, kelayakan masuk gakin menurut kriteria BPS, sumber informasi petugas pencacah, pengambilan BLT, dan kebocoran BLT.

Orientasi dan Pendekatan penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan cara observasi langsung, survey dan interviu. Proses pengumpulan data dimulai awal bulan Agustus 2005 yaitu dengan menyediakan angket pada tempat pengambilan BLT di setiap kantor pos dilingkungan kabupaten Kediri yang terpilih atau yang telah dijadikan sampel penelitian. Untuk menjamin kelengkapan dan kebenaran angket dilakukan observasi langsung dan interviu beberapa responden. Selanjutnya angket yang terisi dan layak ditabulasikan untuk dianalisis lebih lanjut. Dan akhirnya sampai akhir Maret 2006 angket yang disebarakan terkumpul 500 responden yang telah mengisi dengan benar sesuai petunjuk pengisian.

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi penelitian adalah seluruh penerima BLT di Kabupaten Kediri. Mengingat terbatasnya waktu dan biaya maka diperlukan untuk mengambil sampel penelitian.

Jika penelitian diadakan dengan populasi dari sebuah Kabupaten, sedangkan yang harus menjadi sampel hanya sepuluh buah desa saja, ini berarti harus diseleksi sekian banyak desa yang ada dalam kecamatan dalam kabupaten tersebut untuk dijadikan sampel. Oleh karena itu Teknik Sampling Gugus Bertahap dapat digunakan untuk keperluan tersebut, Bungin (2005:113).

Dengan model Teknik sampling gugus didapatkan sampel penelitian yaitu sepuluh desa yang menyebar di sepuluh kecamatan berikut, Plemahan, Ringinrejo, Ngancar, Pagu, Gampengrejo, Mojo, Papar, Kandangan, Tarokan, dan Pare. Selanjutnya dari masing-masing kecamatan diambil 50 gakin yang menjadi sampel penelitian. Sehingga secara keseluruhan terdapat 500 orang yang menjadi sampel penelitian. Sedangkan untuk petugas diambil 10 responden untuk setiap kecamatan, sehingga secara keseluruhan terdapat 100 responden yang menjadi sampel penelitian.

Waktu dan Tempat Pelaksanaan Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan selama delapan bulan, dimulai pada bulan Agustus 2005 sampai dengan Maret 2006, bertempat di sepuluh kecamatan yang tersebar di Wilayah Kabupaten Kediri.

HASIL PENELITIAN

Usulan Jumlah Gakin

Usulan jumlah keluarga miskin (Gakin) ini ditentukan dengan menggunakan kuota yang diperoleh dari pemerintah pusat. Dari data di BPS (2003) terdapat 257.243 gakin dari 353.875 jumlah keluarga (72% keluarga di Kediri adalah miskin) di kabupaten Kediri.

Tabel 4.1: Hasil angket petugas Butir 1-4 tentang usulan Gakin

No	Pernyataan	SETUJU (%)	TDK SETUJU (%)
1	Semua keluarga miskin (Gakin) di desa, saya usulkan untuk mendapat bantuan langsung tunai (BLT)	99	1
2	Semua Gakin yang saya usulkan mendapat BLT	10	90
3	Jumlah penerima BLT sesuai dengan yang saya usulkan	8	92
4	Jumlah penerima BLT ditentukan oleh badan pusat statistik (BPS)	99	1

Sumber: Data diolah

Jumlah gakin yang diusulkan BPS untuk mendapatkan BLT sebanyak 100.829 KK dan disetujui 97.389 gakin. Sehingga masih terdapat 3.440 gakin yang ditolak untuk mendapat BLT. Bila dikonsultasikan dengan data seluruh gakin terdapat 38% gakin yang telah mendapat BLT.

Hal ini sesuai dengan hasil penelitian bahwa petugas dari desa RT atau Perangkat desa yang mengisi angket mengatakan bahwa semua gakin diusulkan untuk mendapat BLT (99%) sedangkan kenyataan tidak semua gakin yang diusulkan mendapat BLT (92%). Hampir seluruh petugas (99%) mengetahui bahwa jumlah penerima BLT telah ditentukan oleh BPS melalui kuota dari pusat.

Sosialisasi Program BLT dan Kendalanya

Sosialisasi program BLT telah dilaksanakan di seluruh desa, dari 80% perangkat desa termasuk RT telah mensosialisasikan program BLT ini dengan baik. Namun sebagian warga 87% mengaku tidak jelas tentang adanya program BLT ini dan apa syarat-syarat

untuk dapat memperoleh BLT ini. Ini sesuai dengan pengakuan petugas 89% mereka menemui kendala dalam mensosialisasikan program BLT ini. Dari pengamatan dilapangan didapatkan bahwa petugas desa menganggap program ini terlalu mepet sehingga sulit mendapatkan waktu untuk sosialisasi.

Tabel 4.2: Hasil angket petugas Butir 7-9 tentang sosialisasi program BLT

No	Pernyataan	SETUJU (%)	TDK SETUJU (%)
7	Saya mensosialisasikan program BLT kepada warga	80	20
8	Semua warga saya telah jelas tentang program BLT	13	87
9	Saya banyak mendapat kendala dalam sosialisasi program BLT	89	11

Sumber: Data diolah

Sebagian warga mengaku bahwa mereka tidak datang pada waktu sosialisasi dengan berbagai macam alasan. Ada yang mengatakan masih bekerja, ada yang mengatakan istirahat bahkan ada yang mengatakan saya ikut saja keputusan rapat alias tidak mau datang.

Proses Pendataan oleh Petugas

Proses pendataan ini dilakukan oleh petugas pencacah dari BPS, namun kenyataan mereka mendapatkan data dari petugas atau perangkat desa. Dari pantauan tim penelitian 59% perangkat desa diberikan tugas untuk m enecat sendiri Gakin di Desanya. Hasil ini menunjukkan kerawanan dalam penentuan gakin yakni pilih-kasih dalam mendaftar gakin. Sebanyak 13% perangkat yang mendata gakin ditemani petugas dari BPS.

Tabel 4.3: Hasil angket petugas Butir 5,6 dan 12,13 tentang pendataan Gakin

No	Pernyataan	SETUJU (%)	TDK SETUJU (%)
5	Saya mendata sendiri Gakin di desa	59	41
6	Saya mendata Gakin bersama petugas BPS	13	87
12	Sebagian Gakin ada yang tidak mendapatkan BLT	95	5
13	Sebagian warga ingin dimasukkan kedalam daftar Gakin	94	6

Sumber: Data diolah

Dari lapangan juga ditemukan bahwa 95% petugas mengetahui bahwa sebagian gakin masih ada yang tidak mendapat BLT. Bahkan sebagian dari warga 94% ingin dimasukkan daftar gakin. Hal ini menarik untuk didiskusikan bahwa sebagian masyarakat masih mengharapkan dapat bantuan dari pemerintah, meskipun secara nyata mereka berkecukupan. Ini menuntut kita untuk memperketat persyaratan dan mempertegas kriteria gakin.

Bentuk Bantuan

Hampir semua 99,2% responden senang menerima bantuan berupa uang tunai. Hanya 19,2% yang senang menerima bantuan berupa beras atau pakaian. Dan 8,8 % mereka senang diberi bantuan berupa alat untuk kerja.

Tabel 4.4: Hasil angket penerima Butir 1-3 tentang bentuk bantuan

No	Pernyataan	SETUJU (%)	TDK SETUJU (%)
1	Saya senang bantuan yang diberikan pemerintah berbentuk uang (tunai).	99,2	0,8
2	Saya lebih senang jika bantuan yang diberikan pemerintah berupa beras atau pakaian.	19,2	80,8
3	Saya lebih senang jika bantuan yang diberikan pemerintah berupa alat untuk kerja.	8,8	91,2

Sumber: Data diolah

Temuan ini juga merupakan bukti kebijakan pemerintah memberikan bantuan berupa uang tunai mendapat dukungan penuh dimata gakin. Dengan diberikan uang tunai gakin diberikan kebebasan untuk membelanjakan uang tersebut sesuai kebutuhan mereka. Sehingga pemberian bantuan tidak sia-sia, karena jika diberikan barang yang tidak sesuai dengan kebutuhan-nya mereka akan menjualnya dan akibatnya nilai jualnya tidak sesuai dengan nilai bantuan.

Kelaikan Masuk Gakin versi Penerima BLT

Kelaikan mereka masuk gakin versi penerima BLT ini menunjukkan tingkat kejujuran masyarakat menilai kelas dari keluarganya sendiri. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat 11,2 % masyarakat yang merasa tidak layak mendapat bantuan dari pemerintah. Hasil ini menunjukkan bahwa keakuratan data masih kurang. Karena melebihi 10% dari signifikansi yang secara universal dipakai dalam penelitian.

Hasil yang sama juga ditunjukkan bahwa terdapat 11,2 % masyarakat yang merasa tidak miskin tetapi masuk dalam daftar gakin. Dan menurut mereka 58,8% mengatakan bahwa masih banyak gakin yang belum mendapat BLT, bahkan 32,2% mengatakan masih ada yang penghasilannya dibawah mereka belum mendapat BLT.

Tabel 4.5: Hasil angket penerima BLT Butir 4-8 tentang Kelaikan masuk Gakin versi penerima BLT

No	Pernyataan	SETUJU (%)	TDK SETUJU (%)
4	Saya layak mendapat bantuan dari pemerintah.	88,8	11,2
5	Saya termasuk dalam golongan keluarga miskin.	88,8	11,2
6	Masih banyak keluarga seperti saya yang belum mendapat BLT.	58,8	41,2
7	Ada keluarga yang penghasilannya dibawah saya tidak mendapat BLT.	32,2	67,8
8	Ada keluarga yang berpenghasilan diatas saya yang mendapat BLT.	47,2	52,8

Sumber: Data diolah

Dan yang lebih memprihatinkan bahwa 47,2% mereka yang mendapat BLT penghasilannya diatas rata-rata penerima BLT. Ini mengingatkan petugas untuk lebih berhati-hati dalam menetapkan daftar gakin.

Kelaikan Masuk Gakin Versi BPS

Terdapat 11,6% penerima BLT yang memakai sepeda motor untuk keperluan sehari-hari, hasil ini konsisten dengan hasil kelaikan gakin versi penerima, yang mengatakan 11,2% mereka tidak layak masuk gakin.

Tabel 4.6: Hasil angket penerima BLT Butir 9-13 tentang Kelaikan masuk Gakin versi BPS

No	Pernyataan	SETUJU (%)	TDK SETUJU (%)
9	Untuk keperluan sehari-hari saya selalu memakai sepeda motor	11.6	88.4
10	Penghasilan rata-rata saya per bulan kurang dari Rp 600.000,-	78.6	21.4
11	Saya menggunakan kayu/ arang untuk memasak	79.8	20.2
12	Lantai rumah saya keramik atau plester dari semen	42.6	57.4
13	Saya memiliki hewan ternak sendiri (kambing/ sapi)	16.4	83.6

Sumber: Data diolah

Begitu juga bila penghasilan penerima BLT bila dikonsultasikan dengan penghasilan maksimal Rp 600.000,- sesuai kebutuhan pokok minimal, maka terdapat 21,2% yang memiliki penghasilan di atas Rp 600.000,-. Kesesuaian ini juga konsisten jika dikonsultasikan dengan kriteria BPS dalam memasak 79,8% penerima BLT masih menggunakan arang atau kayu bakar. Sedangkan jika dilihat dari lantai rumah, terdapat 42,6% penerima BLT yang lantai rumahnya keramik atau diplester dengan semen. Dan jika ditinjau dari hewan ternak yang dimiliki, 16,4 % penerima BLT memiliki hewan ternak sapi atau kambing. Sehingga tingkat kesesuaian penerima BLT menurut kriteria BPS sekitar 80%.

Sumber Informasi Petugas Pencacah

Sumber utama gakin sebagian besar berasal dari ketua RT ataupun perangkat desa, dan sedikit dari mereka yang didata langsung oleh petugas pencacah dari BPS.

Tabel 4.7: Hasil angket penerima BLT Butir 14-16 tentang Sumber Informasi Petugas Pencacah

No	Pernyataan	SETUJU (%)	TDK SETUJU (%)
14	Saya didaftar oleh ketua RT untuk mendapatkan BLT ini	62.8	37.2
15	Saya didaftar oleh Perangkat desa untuk mendapatkan BLT ini.	64.8	35.2
16	Saya didaftar oleh petugas BPS untuk mendapatkan BLT ini.	14.2	85.8

Sumber: Data diolah

Ini ditunjukkan oleh hasil penelitian bahwa 62,8% mereka didaftar oleh ketua RT, 64,2% mereka didaftar oleh perangkat desa, dan 14,2% mereka didata langsung oleh petugas pencacah dari BPS. Hal ini akan memicu penyimpangan karena data banyak yang diperoleh secara langsung yakni hanya dari data sekender yang diperoleh dari RT maupun

perangkat desa masing-masing. Sehingga keakuratan data gakin ini masih diragukan. Karena masih banyak yang mengaku mereka mestinya tidak layak masuk gakin tetapi didaftar dan sebaliknya masih banyak mengaku gakin tetapi mereka tidak didaftar.

Proses Pengambilan BLT

Proses pengambilan BLT ini sebagian besar dikordinasikan oleh desa 33,4% dari penerima BLT. Hasil ini juga konsisten dengan pengakuan perangkat desa bahwa 50% mereka mengkoordinasikan pengambilan BLT di kantor pos kecamatan. 39,8% mereka mengambil sendiri di kantor pos. Tetapi sebagian besar dari mereka 91,2% senang jika BLT langsung diterimakan di rumah. Dan hanya 53,6% yang menginginkan BLT diterimakan di Balai Desa masing-masing.

Tabel 4.8: Hasil angket penerima BLT Butir 17-20 tentang Proses Pengambilan BLT

No	Pernyataan	SETUJU (%)	TDK SETUJU (%)
17	BLT saya ambil sendiri di kantor POS.	39.8	60.2
18	Untuk mengambil BLT dikordinasikan oleh Kepala Desa.	33.4	66.6
19	Saya lebih senang jika BLT diterimakan di rumah	91.2	8.8
20	Saya lebih senang jika BLT diterimakan di kantor Desa	53.6	46.4

Sumber: Data diolah

Dari pantauan dilapangan banyak kerawanan jika pengambilan dilakukan di kantor pos, terutama bagi yang sudah tua atau jompo. Masih memerlukan kearifan pemerintah untuk memikirkan kelompok ini.

Kebocoran BLT

Usaha pemerintah dalam memberantas KKN ini dibuktikan dengan kebijakan pengambilan BLT, harus diambil sendiri tanpa perantara. Ini sesuai dengan hasil dilapangan bahwa 98,2% mereka menerima bantuan BLT utuh tanpa potongan. Namun budaya timur yang menganggap bahwa yang memberikan bantuan adalah petugas masih banyak yang memberikan ucapan terimakasih dengan memberikan sebagian BLT yang mereka terima. Bahkan yang diberi bervariasi mulai dari ketua RT, petugas kantor pos, perangkat desa maupun ketua rombongan. Rerata 97% mereka memberikan sebagian BLT mereka kepada petugas.

Jika ini dianggap kebocoran BLT maka tingkat kebocoran termasuk tinggi, karena semua memberikan ucapan terimakasih kepada petugas (97%). Tetapi besarnya tidak termonitor karena mereka merasa enggan untuk menunjukkan besarnya, namun dipastikan hampir semua 98,6% memberi.

Tabel 4.9: Hasil angket penerima BLT Butir 21-25 tentang Kebocoran BLT

No	Pernyataan	SETUJU (%)	TDK SETUJU (%)
21	BLT saya terima utuh tanpa ada potongan	98.6	1.4
22	Saya memberikan sebagian BLT kepada RT sebagai ucapan terimakasih	2	98

23	Saya memberikan sebagian BLT kepada perangkat desa sebagai ucapan terimakasih	0,2	99,8
24	Saya memberikan sebagian BLT kepada petugas kantor POS sebagai ucapan terimakasih	0,2	99,8
25	Saya memberikan sebagian BLT kepada ketua rombongan sebagai ucapan terimakasih	10,8	89,2

Sumber: Data diolah

Hasil ini juga diperoleh dari pengakuan petugas (angket no 11 untuk petugas) bahwa 11% mereka diberikan uang BLT dari gakin sebagai ucapan terimakasih.

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang di uraikan diatas diperoleh beberapa simpulan:

1. Data di BPS (2003) menyebutkan terdapat 257.243 gakin dari 353.875 jumlah keluarga berarti terdapat 72% keluarga miskin di Kabupaten Kediri. Dari 257.243 gakin yang mendapat BLT tahap pertama sebanyak 97.389 gakin, berarti masih terdapat 62% gakin yang belum mendapat BLT.
2. 80% perangkat desa termasuk RT telah mensosialisasikan program BLT ini dengan baik. Namun mereka banyak menemui kendala, sehingga sebagian warga 87% mengaku tidak jelas tentang adanya program BLT ini.
3. Sebanyak 13% perangkat yang mendata gakin ditemani petugas dari BPS dan lainnya mengaku mendapatkan data dari RT atau perangkat.
4. Hampir semua yakni 99,2% responden senang menerima bantuan berupa uang tunai.
5. Terdapat 11,2 % masyarakat yang merasa tidak layak mendapat bantuan dari pemerintah namun menerima BLT (versi gakin).
6. Terdapat 11,6% penerima BLT yang tidak laik masuk gakin versi kriteria BPS. Hal ini ditunjukkan dengan kepemilikan sepeda motor untuk keperluan sehari-hari.
7. 14,2% penerima BLT yang didata langsung oleh petugas pencacah dari BPS, salah satu hal yang memicu ketidak akuratan data atau memunculkan keraguan.
8. Sebagian besar dari penerima BLT 91,2% senang jika BLT langsung diterimakan dirumah. Dan 53,6% mereka mendukung BLT dapat diberikan di balai desa masing-masing.
9. Walaupun besarnya tidak diketahui tingkat kebocoran termasuk tinggi, karena sebagian besar 97% penerima BLT memberikan ucapan terimakasih kepada petugas.

Rekomendasi

1. Untuk mempercepat program pengentasan kemiskinan maka perlu diusulkan peningkatan jumlah kuota penerima BLT hingga mencapai 100%.
2. Kualitas sosialisasi program perlu ditingkatkan lagi, karena dari 80% perangkat desa termasuk RT telah mensosialisasikan program BLT ini baru 23% penerima BLT yang mengaku telah jelas tentang adanya program BLT ini.
3. Untuk menghindari kesalahan data maka petugas pencacah harus turun langsung kelapangan sehingga data gakin penerima BLT autentik atau sesuai dengan keadaan sebenarnya.
4. Pemberian bentuk bantuan berupa uang tunai harus dipertahankan. Karena hampir semua yakni 99,2% responden senang menerima bantuan berupa uang tunai.

5. Perlu adanya verifikasi lagi tentang daftar gakin tahap pertama, karena terdapat 11,2 % masyarakat yang merasa tidak layak mendapat bantuan dari pemerintah namun menerima BLT (versi gakin). Begitu juga terdapat 11,6% penerima BLT yang tidak laik masuk gakin versi kriteria BPS.
6. perlu dipikirkan tentang penerimaan BLT dapat dilakukan dirumah masing-masing, karena 91,2% penerima BLT mendukung hal ini.
7. Perlu adanya pihak pendamping atau pemantau pencairan BLT. Hal ini untuk mendukung program percepatan pemberantasan KKN di pemerintah. Karena hasil penelitian 97% penerima BLT memberikan ucapan terimakasih kepada petugas.

Referensi

- Bungin, Burhan, 2000. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: Prenada Media.
- Nubyanto, 2000. *Membangun Sistem Ekonomi*, Yogyakarta: BPFE
- <http://www.bps.go.id>
- <http://www.d-infokom-jatim>
- <http://www.jawapos.com>